

SISTEM PEMERINTAHAN PADA MASA UTSMAN BIN AFFAN

**Muhammad Arief Samudera¹, M. Obiadito Rizzaky H.², Maulana Zakky Musyafa³,
Akbar Rizki Wahyu Pradana Madan Saputra⁴, Abidin Latua⁵**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

aditomuhammad3@gmail.com

ABSTRAK

Kepemimpinan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga dalam sejarah Khulafaur Rasyidin menandai fase penting dalam perkembangan sistem pemerintahan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sistem pemerintahan yang diterapkan pada masa Utsman bin Affan, dengan menyoroti struktur administrasi, mekanisme pengangkatan pejabat, kebijakan-kebijakan strategis, serta dinamika sosial-politik yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap sumber-sumber sejarah Islam klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintahan Utsman bin Affan mempertahankan prinsip-prinsip dasar syura (musyawarah), namun mengalami perubahan dalam praktik administratif, seperti pengangkatan kerabat sebagai gubernur yang kemudian memicu kontroversi dan konflik internal. Meskipun demikian, Utsman bin Affan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dan memperkuat sistem administrasi pemerintahan melalui kodifikasi mushaf Al-Qur'an dan pengaturan birokrasi yang lebih sistematis. Kajian ini menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan berada dalam transisi antara idealisme awal Khulafaur Rasyidin dan kebutuhan pragmatis dalam mengelola imperium Islam yang semakin luas.

Kata Kunci: Utsman bin Affan, sistem pemerintahan, Khulafaur Rasyidin, administrasi Islam, syura

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan dalam Islam memiliki kedudukan penting dalam menjaga kemaslahatan umat. Sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi tantangan kepemimpinan yang harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat. Dalam konteks inilah sistem khilafah muncul sebagai solusi untuk menjaga stabilitas sosial, hukum, dan politik umat Islam. Salah satu periode yang paling kompleks dan menarik untuk dikaji adalah masa kekhalifahan Utsman bin Affan, khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin.

Utsman bin Affan adalah sosok pemimpin yang dikenal karena kesalehan, keteguhan, serta kontribusinya dalam menyebarkan Islam dan membentuk administrasi pemerintahan yang lebih sistematis. Masa pemerintahannya ditandai dengan berbagai kemajuan, seperti kodifikasi mushaf Al-Qur'an dan perluasan wilayah kekuasaan Islam hingga ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut, muncul pula berbagai

tantangan seperti gejolak sosial, tuduhan nepotisme, serta perpecahan politik yang memuncak pada tragedi pembunuhan beliau.

Dalam konteks fiqih siyasah, masa pemerintahan Utsman bin Affan penting untuk diteliti karena menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya saat menghadapi dinamika masyarakat yang majemuk dan gejolak politik internal. Pembentukan sistem pemerintahan pada masa ini menjadi fondasi bagi pengembangan pemerintahan Islam pada masa-masa berikutnya, baik di era Khulafaur Rasyidin maupun kekhalifahan setelahnya.

Melalui kajian ini, penulis berupaya menelusuri sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Utsman bin Affan secara komprehensif, dengan melihat kebijakankebijakan politik, struktur pemerintahan, dan tantangan yang dihadapinya. Diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi umat Islam, khususnya dalam melihat relevansi konsep kepemimpinan Islam dengan realitas kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu menelaah sumber-sumber primer seperti kitab-kitab tarikh (sejarah) dan sirah, serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menafsirkan sistem pemerintahan yang dijalankan Utsman bin Affan. Validitas data diperkuat dengan membandingkan beberapa sumber untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan berimbang.

PEMBAHASAN

Biografi Singkat dan Proses Pengangkatan Utsman bin Affan

Utsman bin Affan bin Abil ‘Ash bin Umayyah adalah salah satu sahabat utama Rasulullah SAW yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam, baik di masa kenabian maupun setelahnya. Beliau lahir dari kalangan bangsawan Quraisy Bani Umayyah di Makkah sekitar tahun 576 M, dan merupakan salah satu dari sahabat yang paling awal memeluk Islam, bahkan termasuk dalam golongan Assabiqunal Awwalun. Utsman dikenal sebagai pribadi yang sangat pemalu, lembut, dermawan, dan memiliki akhlak yang mulia. Ia juga merupakan menantu Nabi Muhammad SAW, karena menikahi dua putri beliau secara berturut-turut, yaitu Ruqayyah dan setelah wafatnya, kemudian dinikahkan dengan Ummu Kultsum. Karena itu, ia dijuluki sebagai *Dzun Nurain* (pemilik dua cahaya) .

Kepribadian Utsman yang tenang dan diplomatis menjadikannya sebagai sosok yang dipercaya oleh umat Islam, terutama ketika menghadapi transisi kekuasaan setelah wafatnya Umar bin Khattab. Sebelum wafat, Umar tidak menunjuk langsung penggantinya, melainkan membentuk sebuah *tim syura* (dewan musyawarah) yang terdiri dari enam orang sahabat terkemuka: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqqash, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dewan ini bertugas memilih satu di antara mereka untuk diangkat sebagai khalifah .

Dalam proses pemilihan ini, Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai mediator utama. Ia menjalankan mekanisme musyawarah yang cermat dan hati-hati, termasuk melakukan

konsultasi dengan berbagai elemen masyarakat Madinah untuk mengetahui siapa yang lebih diterima dan diyakini mampu memimpin. Hasil dari konsultasi dan musyawarah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam pada saat itu lebih condong kepada Utsman bin Affan. Salah satu faktor penentu adalah sifatnya yang lembut, toleran, dan tidak konfrontatif, sehingga dianggap mampu menjaga stabilitas dalam periode transisi yang rawan perpecahan

Utsman bin Affan secara resmi diangkat sebagai khalifah ketiga umat Islam pada tahun 644 M (23 H), setelah disepakati dalam musyawarah tersebut. Masa pemerintahannya berlangsung selama dua belas tahun, yang secara umum terbagi menjadi dua fase: enam tahun pertama yang relatif stabil dan penuh pencapaian, serta enam tahun kedua yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan sosial dan konflik politik. Pada fase awal, Utsman berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan hingga ke wilayah Afrika Utara dan sebagian Asia Tengah, serta melakukan pembenahan dalam sistem administrasi pemerintahan, termasuk pengukuhan mushaf standar Al-Qur'an untuk menyatukan bacaan umat Islam di seluruh wilayah kekuasaan .

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai tuduhan terhadap Utsman, terutama terkait praktik nepotisme dalam pengangkatan pejabat pemerintahan, di mana ia banyak menunjuk anggota keluarganya dari Bani Umayyah sebagai gubernur dan pemimpin daerah. Hal ini memicu gelombang ketidakpuasan di berbagai wilayah seperti Mesir, Kufah, dan Basrah. Ketidakpuasan itu kemudian berkembang menjadi protes terbuka, bahkan pemberontakan. Di akhir masa pemerintahannya, situasi menjadi semakin genting hingga akhirnya Utsman dibunuh oleh sekelompok pemberontak di rumahnya sendiri saat beliau sedang membaca Al-Qur'an .

Peristiwa ini menjadi titik awal dari fitnah besar dalam sejarah Islam dan memecah belah umat secara politik. Namun demikian, jasa-jasa Utsman bin Affan tetap diakui secara luas dalam sejarah Islam, terutama dalam bidang pembukuan Al-Qur'an dan ekspansi kekuasaan Islam yang besar selama masa pemerintahannya. Kepemimpinannya mencerminkan tantangan besar dalam menerapkan sistem pemerintahan Islam yang ideal di tengah dinamika sosial-politik yang mulai kompleks.

Struktur dan Sistem Pemerintahan Masa Utsman bin Affan

Pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, sistem pemerintahan masih tetap menggunakan sistem khilafah, yakni bentuk pemerintahan yang menempatkan khalifah sebagai pemimpin tertinggi baik dalam urusan agama maupun negara. Namun, dalam praktiknya, Utsman melakukan sejumlah reformasi dan penguatan dalam struktur pemerintahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama menyikapi meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan bertambahnya kompleksitas sosial masyarakat Islam saat itu.

Sentralisasi Kekuasaan dan Penunjukan Gubernur

Khalifah Utsman memperkuat kendali pemerintah pusat melalui kebijakan sentralisasi kekuasaan, terutama dengan menunjuk gubernur-gubernur di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Yang menjadi ciri khas dari kebijakan ini adalah bahwa banyak dari para gubernur yang ditunjuk berasal dari kalangan kerabat dekat atau tokoh-tokoh Quraisy yang dianggap loyal dan dapat dipercaya. Misalnya, ia mengangkat Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur Syam dan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh sebagai gubernur Mesir .

Meskipun tujuan Utsman adalah untuk menjaga stabilitas politik dan efisiensi administrasi di daerah-daerah, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Penunjukan para kerabat menimbulkan kecurigaan terhadap praktik nepotisme, terutama dari kalangan sahabat yang tidak menyetujui dominasi Bani Umayyah dalam pemerintahan. Situasi ini lambat laun menyebabkan ketidakpuasan publik, yang menjadi salah satu faktor penyulut krisis politik di akhir masa pemerintahannya .

Administrasi dan Keuangan

Dalam aspek administrasi, Utsman bin Affan melakukan penyempurnaan sistem pencatatan wilayah dan keuangan negara. Ia melanjutkan sistem diwan (kantor pencatatan) yang telah dibentuk pada masa Umar bin Khattab, dan bahkan memperluas jangkauan administrasinya ke daerah-daerah baru yang telah ditaklukkan.

Dalam sektor keuangan, Utsman memperbaiki sistem distribusi harta negara, baik yang berasal dari zakat, jizyah, maupun kharaj (pajak tanah). Salah satu pendekatannya adalah memastikan agar pendapatan dari berbagai wilayah dapat didistribusikan secara adil dan merata, baik kepada rakyat maupun untuk kebutuhan militer dan birokrasi negara . Sistem ini juga mencerminkan usaha Utsman untuk menjaga keutuhan negara yang mulai kompleks karena perbedaan etnis dan budaya di wilayah-wilayah Islam yang semakin luas.

Kodifikasi Al-Qur'an

Salah satu pencapaian paling signifikan Khalifah Utsman bin Affan adalah kodifikasi mushaf Al-Qur'an. Pada masa ekspansi wilayah yang sangat cepat, muncul variasi bacaan Al-Qur'an di kalangan kaum muslimin, khususnya di wilayah-wilayah yang baru masuk Islam seperti Irak, Syam, dan Mesir. Kekhawatiran terhadap potensi perpecahan karena perbedaan qira'at (bacaan) mendorong Utsman untuk mengambil inisiatif penting ini.

Ia membentuk tim khusus yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit dan terdiri dari para hafiz serta penulis wahyu, untuk menyalin dan menyusun mushaf standar. Hasil dari proyek ini adalah mushaf yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang kemudian dikirim ke berbagai daerah penting dengan perintah untuk membakar mushaf-mushaf lain yang berbeda bacaan dengannya. Langkah ini sangat penting dalam menjaga kesatuan teologis dan identitas umat Islam, serta menjadi fondasi utama dalam pemeliharaan keotentikan Al-Qur'an hingga sekarang .

Pembentukan Angkatan Laut

Dalam bidang pertahanan dan ekspansi militer, Utsman bin Affan dikenal sebagai khalifah pertama yang secara resmi membentuk angkatan laut Islam. Langkah ini merupakan respons terhadap kebutuhan strategis untuk mengamankan wilayah-wilayah pesisir dan mengimbangi kekuatan maritim Kekaisaran Bizantium yang mendominasi Laut Tengah saat itu.

Angkatan laut ini terbukti efektif, khususnya dalam ekspedisi-ekspedisi militer di wilayah-wilayah seperti Siprus, Asia Kecil, dan pesisir Afrika Utara. Keberhasilan ini memperkuat posisi politik dan ekonomi umat Islam di kawasan tersebut serta menjadi tonggak baru dalam sejarah militer Islam, yang sebelumnya lebih fokus pada kekuatan darat

Dengan reformasi dan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintahan Utsman bin Affan menjadi masa transisi penting dalam perkembangan sistem pemerintahan Islam dari bentuk

sederhana menjadi lebih kompleks dan terstruktur, sebagai respons terhadap perluasan kekuasaan dan keberagaman umat.

Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Pemerintahan Utsman bin Affan Konsep Syura dalam Pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan

Konsep *syura* atau musyawarah merupakan prinsip fundamental dalam fiqih siyasah Islam, dan terlihat jelas dalam proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab wafat, ia membentuk sebuah *majlis syura* yang beranggotakan enam sahabat terkemuka: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Keenam sahabat ini diberi amanat untuk memilih satu di antara mereka sebagai khalifah berikutnya.

Dalam prosesnya, Abdurrahman bin Auf menarik diri dari pencalonan dan diberi kepercayaan sebagai penentu akhir dengan mempertimbangkan aspirasi umat. Ia mengadakan konsultasi luas dengan tokoh-tokoh masyarakat dan penduduk Madinah sebelum akhirnya membaiat Utsman bin Affan. Ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada bentuk demokrasi formal dalam sistem khilafah, prinsip musyawarah tetap menjadi mekanisme penting dalam penentuan pemimpin. Syura ini bukan hanya simbol formalitas, melainkan refleksi partisipasi publik dan kepatuhan pada prinsip kolektif dalam kepemimpinan Islam.

Prinsip Al-'Adalah (Keadilan) dan Kritik terhadap Dugaan Nepotisme

Salah satu prinsip utama dalam fiqih siyasah adalah keadilan (*al-'adalah*), yang menjadi dasar legitimasi pemerintahan Islam. Dalam pemerintahan Utsman bin Affan, prinsip ini dijaga dalam banyak aspek, seperti distribusi zakat, penunjukan pejabat daerah, dan pengelolaan baitul mal. Namun, pada paruh kedua pemerintahannya, muncul kritik terhadap dugaan nepotisme, yaitu kecenderungan Utsman menunjuk kerabatnya dari Bani Umayyah ke dalam jabatan strategis.

Sebagai contoh, ia mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam dan Marwan bin Hakam sebagai sekretaris pribadi. Kritik ini datang dari sebagian sahabat dan masyarakat yang menganggap keputusan itu sebagai bentuk ketidakadilan dan penyimpangan dari praktik pendahulunya. Namun, perlu dicatat bahwa penunjukan tersebut dilandasi oleh pertimbangan kapasitas, loyalitas, dan stabilitas politik, terutama dalam menghadapi pemberontakan dan ancaman dari luar Madinah.

Dengan demikian, walaupun kritik terhadap nepotisme menjadi isu penting, Utsman tidak dapat langsung dinilai lalai dalam prinsip keadilan. Keputusan-keputusannya masih dapat dilihat sebagai upaya menyeimbangkan antara kebutuhan praktis pemerintahan dan nilai-nilai ideal Islam.

Tanggung Jawab Khalifah terhadap Stabilitas Umat (Maslahah)

Dalam fiqih siyasah, tujuan utama pemerintahan adalah mewujudkan *maslahah* atau kemaslahatan umum. Utsman bin Affan memahami hal ini sebagai tanggung jawab utama seorang khalifah. Masa pemerintahannya ditandai dengan ekspansi wilayah Islam ke wilayah Afrika Utara dan Asia Tengah, serta kodifikasi mushaf AlQur'an secara resmi untuk menjaga kesatuan umat Islam yang semakin meluas.

Namun, di sisi lain, Utsman menghadapi berbagai tantangan internal seperti gejala sosial, ketidakpuasan terhadap pejabat lokal, dan penyebaran fitnah. Dalam konteks ini, Utsman tetap berusaha mempertahankan stabilitas dengan menghindari pertumpahan darah. Misalnya, ketika para pemberontak mengepung rumahnya, ia menolak mengerahkan kekuatan untuk membela dirinya karena khawatir akan menciptakan perang saudara di tengah umat Islam. Sikap ini menunjukkan kedalaman pemahaman Utsman terhadap pentingnya menjaga *masalah* umat daripada sekadar mempertahankan kekuasaan pribadi .

Relevansi dengan Teori Politik Islam Klasik dan Kontemporer

Pemerintahan Utsman bin Affan memiliki relevansi signifikan terhadap diskursus teori politik Islam, baik klasik maupun kontemporer. Dalam teori politik klasik, seperti yang dibahas oleh al-Mawardi dan al-Farabi, pemimpin ideal adalah yang adil, memiliki kemampuan politik, dan menjaga kesatuan umat. Utsman memenuhi kriteria ini, terutama dalam tahap awal pemerintahannya.

Dalam konteks kontemporer, praktik syura yang dijalankan Utsman bisa dimaknai sebagai cikal bakal prinsip partisipasi publik yang menjadi fondasi demokrasi modern. Isu-isu seperti nepotisme dan kritik publik terhadap pemimpin juga menjadi relevan, menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan unsur penting bahkan dalam sistem khilafah.

Tantangan dan Konflik Politik pada Masa Pemerintahan Utsman bin Affan

Pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan menghadapi berbagai tantangan serius, terutama di bidang politik dan sosial. Seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam, muncul pula permasalahan internal yang semakin kompleks. Salah satu isu utama yang menjadi pemicu keresahan adalah tuduhan nepotisme. Utsman dituduh oleh sebagian masyarakat dan elit politik saat itu telah mengangkat kerabatnya dari klan Umayyah untuk menempati posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, baik sebagai gubernur maupun pejabat penting lainnya. Penunjukan seperti Marwan bin al-Hakam sebagai penasihat dan beberapa gubernur dari kalangan keluarga Utsman dinilai tidak objektif oleh sebagian masyarakat .

Selain itu, ketimpangan sosial semakin terasa di kalangan masyarakat Muslim. Pada masa pemerintahan sebelumnya, sistem distribusi kekayaan negara relatif lebih merata. Namun pada masa Utsman, ada kecenderungan akumulasi kekayaan pada kelompok tertentu, terutama di kalangan elit Quraisy. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti Kufah, Basrah, dan Mesir. Ketidakpuasan terhadap kebijakan fiskal dan administrasi lokal pun menjadi pemantik ketegangan politik .

Protes dan keresahan rakyat kemudian berkembang menjadi pemberontakan. Di Kufah dan Basrah, muncul gerakan yang menuntut keadilan dan perombakan kekuasaan lokal. Namun, situasi yang paling genting terjadi di Mesir. Kelompok pemberontak dari wilayah ini bergerak menuju Madinah dan mengepung rumah Khalifah Utsman. Meskipun Utsman tetap berusaha menunjukkan sikap moderat, terbuka terhadap kritik, dan menolak untuk menggunakan kekerasan dalam menghadapi para pemberontak, situasi politik telah berkembang ke arah yang sulit dikendalikan. Ia menolak mengerahkan pasukan untuk melindungi dirinya karena tidak ingin pertumpahan darah sesama Muslim terjadi atas namanya .

Pengepungan yang berlangsung selama beberapa hari akhirnya berujung tragis. Para pemberontak berhasil masuk ke rumah Utsman dan membunuhnya ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an. Peristiwa ini bukan hanya mengakhiri masa pemerintahannya, tetapi juga menandai dimulainya *fitnah kubra* yakni perpecahan besar dalam tubuh umat Islam yang berujung pada konflik berkepanjangan antara kelompok-kelompok Muslim, termasuk Perang Jamal dan Perang Shiffin pada masa selanjutnya .

Dengan demikian, tantangan dan konflik politik pada masa Utsman bin Affan bukanlah semata karena kelemahan pribadi beliau sebagai pemimpin, melainkan juga disebabkan oleh dinamika sosial-politik yang kompleks, pergulatan antara idealisme keislaman dan realitas kekuasaan, serta ekspansi wilayah yang cepat tanpa diimbangi oleh penguatan struktur sosial dan politik yang memadai.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan pada masa Utsman bin Affan merupakan kelanjutan dari sistem khilafah yang telah dicanangkan oleh pendahulunya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Utsman menerapkan prinsip sentralisasi kekuasaan melalui pengangkatan gubernur dari kalangan kerabat dan orang kepercayaannya. Ia juga berjasa besar dalam kodifikasi mushaf Al-Qur'an serta membentuk angkatan laut Islam untuk memperkuat pertahanan negara.

Meski demikian, kebijakan Utsman tidak lepas dari tantangan dan kritik, terutama terkait dengan praktik nepotisme dan ketidakpuasan dari beberapa wilayah. Dinamika ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam tidak hanya berkutat pada teks dan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat saat itu.

Seluruh rumusan masalah dalam kajian ini yakni bagaimana sistem pemerintahan dijalankan, kebijakan strategis yang diambil, dan tantangan yang dihadapi telah dibahas dan dijawab melalui pendekatan historis dan analisis fiqh siyasah. Tujuan penulisan juga tercapai dengan memberikan gambaran menyeluruh terhadap pemerintahan Utsman, serta memberikan pelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks kekuasaan masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, Nuraeni, & Muhammad Fattah Dwi Artanto. (2023). *Kontribusi Khalifah Usman bin Affan dalam Perkembangan Peradaban Islam*. Carita: Jurnal Sejarah dan Budaya, 2(1), 21–28.
- Abidin, M. Z. (2023). *Dinamika Politik Khulafaurrasyidin*. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 9(2), 85–95.
- Munir, M. (2023). *Kepemimpinan Utsman bin Affan: Studi Politik Pemerintahan dan Fiqih Siyasah*. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman dan Pendidikan, 1(2), 40–50.
- Muttaqin, Z. (2023). *Capaian Peradaban Islam Masa Utsman bin Affan*. Lampung: Seminar Nasional UIN Raden Intan.
- Nurjanah, S. (2022). *Perkembangan Peradaban Islam Masa Khulafaurrasyidin*. AlHikmah: Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 25–33.